

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan

Secara bahasa, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy* yang memiliki arti kebijakan. Sedangkan *policie* dalam bahasa Inggris memiliki arti mengurus kepentingan publik atau dapat juga diartikan sebagai administrasi pemerintah. Kebijakan dapat dijumpai juga dalam bahasa lain, seperti bahasa Latin, bahasa Yunani dan bahasa Sanskerta. Kebijakan dalam bahasa latin disebut dengan *politeia* yang memiliki arti pemerintahan “*settled adopted and followed by a government*” (suatu cara yang ditetapkan, dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah). Kemudian dalam bahasa Yunani kebijakan disebut sebagai *polis* yang memiliki arti negara kota. Kebijakan dapat disebut dalam bahasa Sanskerta dengan *pur* yang memiliki arti kota.¹ Beberapa makna kebijakan dalam berbagai macam bahasa tersebut dapat digabungkan menjadi suatu makna yaitu kebijakan merupakan suatu cara pemerintah dalam menetapkan aturan untuk mengelola kebutuhan dan kepentingan publik di berbagai daerah yang berada di bawah pemerintahannya atau wilayah-wilayah kekuasaannya.

¹ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi Ke Implementasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 31.

Menurut Maskuri, kebijakan merupakan suatu prinsip atau cara yang dipilih dan digunakan dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan.² Sejalan dengan pendapat Koontz dan O'Donnell yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pernyataan atau pemahaman secara umum yang menjadi pedoman pemikiran dalam pengambilan keputusan yang memiliki hakikat batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.³ Dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian prinsip atau dasar yang ditetapkan sebagai pedoman pemikiran dalam mengambil keputusan.

Mudjia Rahardjo mengutip pendapat Duke dan Canady yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah dalam memaknai kebijakan, yaitu 1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai keputusan atau ketetapan lembaga yang digunakan untuk mempromosikan, mengatur, mengendalikan, melayani dan hal-hal yang terkait pengaruh dalam lingkup kewenangan, 3) kebijakan sebagai batasan tindakan yang bersifat diskresi, 4) kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil dalam pemecahan masalah, 5) kebijakan sebagai perilaku yang memiliki kekuatan hukum, 6) kebijakan sebagai aturan atau norma perilaku dengan memiliki ciri adanya konsistensi dan keteraturan dalam bidang-bidang realisasi tindakan atau praktik, 7) kebijakan sebagai *output* dari sistem perumusan kebijakan, 8) kebijakan sebagai pengaruh perumusan

² Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif* (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), 4.

³ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2008), 97.

kebijakan, yang berfokus pada pemahaman khalayak sasaran terhadap penerapan sistem.⁴

Sedangkan perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan yaitu kebijaksanaan merupakan beberapa aturan yang harus diikuti oleh semua orang yang bersangkutan, sifatnya mengikat kepada siapa pun yang terkait dengan kebijaksanaan tersebut. Adapun kebijakan atau *wisdom* merupakan ketetapan dari pimpinan suatu kelompok atau lembaga yang berbeda dengan aturan yang telah ada, yang dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang dikarenakan adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan peraturan yang telah atau sedang berlaku.⁵

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan cara atau strategi yang dapat menjadi pedoman dalam menunjang pencapaian suatu tujuan dengan berupaya memperhatikan dan memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkait tujuan tersebut.

Kebijakan yang terkait dalam konteks ini adalah kebijakan-kebijakan terkait pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan, kesadaran dan ilmu pengetahuan pada masyarakat.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata “didik” yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka kata pendidikan memiliki arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa pendidikan dapat diartikan sebagai proses mengubah sikap dan tingka laku individu atau kelompok individu

⁴ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 3.

⁵ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan.*, 32.

dalam upaya pendewasaan dengan cara dibimbing, diajar dan dilatih.⁶ Pendidikan merupakan proses pendewasaan pada seorang individu berupa perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih baik. Proses pendewasaan tersebut dilakukan dengan membimbing dan menuntun siswa melalui pemberian ilmu pengetahuan atau wawasan kepada peserta didik.

Pendidikan dalam bahasa Inggris adalah *education*, berasal dari bahasa latin *educare*, dapat diartikan “*to lead forth*” yang berarti pembimbingan keberlanjutan. Maka dapat diartikan secara bahasa, pendidikan memiliki sifat keberlanjutan dalam pelaksanaannya artinya pendidikan berlangsung dari generasi kegenerasi sepanjang kehidupan manusia. Kemudian secara teori, para ahli berpendapat yang pertama, bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa sebelum menikah atau sebelum adanya kelahiran baru, bagi setiap individu memiliki kewajiban untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat yang kedua, bagi seorang individu pendidikan dimulai sejak bayi lahir bahkan sejak masih dalam kandungan. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan melekat erat dalam diri manusia sepanjang zaman.⁷

Gambaran definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pendidikan dilaksanakan jauh dari masa kelahiran. Sebelum dan sesudah adanya kelahiran, manusia dituntut untuk melaksanakan proses

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2007), 232.

⁷ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 77.

pendidikan. Semua manusia mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu dimanapun mereka berada.

Pendidikan dalam makna sempit diartikan sebagai suatu hal yang identik dengan sekolah. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai proses pembelajaran atau memberikan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki arti cara atau strategi yang dapat menjadi pedoman dalam menunjang pencapaian suatu tujuan dengan berupaya memperhatikan dan memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkait tujuan tersebut.

3. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Menurut Yoyon Bahtiar Irianto, karakteristik etika kebijakan dalam konteks manajemen pendidikan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pendidikan didapat dari penemuan empiris dengan menggunakan prosedur dan teknik ilmiah.
- b. Kriteria, alat atau prosedur yang menjadi tolok ukur dalam menganalisis kebijakan pendidikan yang bersifat relatif di setiap jalur, model dan jenjang.
- c. Implementasi kebijakan pendidikan diharuskan dapat tercipta produk ataupun dampak yang bernilai bagi masyarakat.

- d. Nilai yang baik di setiap keadaan implementasi kebijakan pendidikan terletak pada keaktifan atau ketekunan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan tersebut.
- e. Sikap yang baik adalah meyakini bahwa keadaan implementasi kebijakan pendidikan pada suatu saat akan memiliki nilai yang baik maupun buruk, tergantung apa yang telah, sedang dan akan direncanakan.⁸

Adapun karakteristik kebijakan pendidikan sendiri diantaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

- b. Memiliki aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan konstitusional yang sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku di setiap daerah atau wilayah sesuai daerah masing-masing dimana kebijakan pendidikan tersebut dikeluarkan.

- c. Memiliki konsep operasional

Adapun konsep operasional di bidang pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁸ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 49.

- 1) Dibuat dan ditetapkan oleh yang berwenang. Kebijakan yang ditetapkan merupakan kebijakan yang disusun oleh pihak ahli di bidang pendidikan.
- 2) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan harus dievaluasi untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Jika hasil evaluasi dari penerapan kebijakan pendidikan yang diajukan baik maka tindak lanjutnya kebijakan tersebut akan dipertahankan dan dikembangkan. Begitu pula sebaliknya, jika hasil evaluasinya terdapat kesalahan maka akan kebijakan tersebut harus diperbaiki atau jika perlu harus diganti.
- 3) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan yang ditetapkan harus dengan sistem keseluruhan aspek yang jelas. Sistem tersebut diharuskan memiliki nilai efektivitas dan efisiensi yang tinggi.⁹

4. Tahapan Perumusan Kebijakan Pendidikan

Perumusan masalah identik dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan berbagai informasi terkait keadaan yang ada atau sedang terjadi yang dapat memunculkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilaksanakan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan publik, termasuk dalam bidang pendidikan yang diperlukan perhatian dari pemerintah yakni dengan mencari berbagai alternatif dari masalah pendidikan yang menjadi fokus publik. Perumusan masalah kebijakan terkait pendidikan dengan mengajukan rencana serangkaian

⁹ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan.*, 38.

tindakan yang lebih baik, dipilih sebagai upaya dalam pencapaian kesepakatan atau mencapai permufakatan bersama, kompromi dan pemberian aturan atau pedoman yang diterapkan sanksi didalamnya, arahan dan tindakan gabungan yang bisa diterima umum atau bersama.¹⁰

Menurut William N. Dunn beberapa tahapan dalam perumusan kebijakan diantaranya sebagai berikut:

a. Merumuskan Masalah Kebijakan

Perumusan masalah kebijakan merupakan kegiatan dalam pengajuan tindakan yang lebih baik sebagai upaya pemecahan masalah di bidang pendidikan. Tindakan-tindakan baru yang diajukan tersebut diperkenalkan dan dicocokkan terhadap masalah pendidikan yang terjadi terlebih dahulu hingga ditemukan kesesuaian atau keefektifan dalam memecahkan masalah di bidang pendidikan tersebut. Hal ini merupakan upaya dalam pencarian solusi yang tepat bagi masalah pendidikan yang sedang terjadi.

Perumusan kebijakan pendidikan merupakan upaya pengembangan pengajuan rencana tindakan yang sesuai dan dapat diterima sebagai alternatif atau pilihan tindakan dalam penanganan permasalahan di bidang pendidikan. Menurut Anderson tidak semua perumusan kebijakan pendidikan akan melahirkan suatu aturan atau undang-undang.¹¹ Akan tetapi pada umumnya rencana kebijakan fokus terhadap adanya perubahan yang mendasar terhadap kebijakan

¹⁰ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 55-56.

¹¹ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 57-58.

yang sudah ada saat ini. Dengan demikian, di akhir perumusan kebijakan pendidikan tidak selalu terdapat adanya perundang-undangan baru, dikarenakan perumusan kebijakan pada umumnya lebih fokus kepada perubahan mendasar dari kebijakan yang telah ditetapkan saat ini

Perumusan masalah terdiri dari beberapa kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni proses pencarian masalah, pengidentifikasian masalah, spesifikasi dan pengenalan masalah.¹² Pada tahap ini, akan didapatkan atau ditentukan definisi masalah atau keadaan terkait pelaksanaan kebijakan yang ada.

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang memiliki beberapa tahapan. Adapun tahapan dalam perumusan masalah menurut William N. Dunn memiliki empat fase yang bergantung antara tahapan satu dengan tahapan lainnya, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahap Pencarian Masalah (*problem search*). Pada tahap ini para perumus kebijakan menentukan masalah apa yang akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan perumusan masalah. Perumus dapat menentukan prioritas dari beberapa masalah.
- 2) Tahap pendefinisian masalah (*problem definition*). Pada tahap ini, para perumus telah menemukan masalah apa yang akan

¹² Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 57-58

diselesaikan yang kemudian akan dipelajari hakikat dari masalah tersebut. Perumus dapat mengerti sebab dan akibat dari masalah yang akan diselesaikan tersebut.

- 3) Tahap spesifikasi masalah (*problem specification*). Pada tahap ini, para perumus dapat menentukan spesifikasi atau jenis dari masalah yang akan diselesaikan, misalnya, masalah yang ada masuk dalam bidang ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan, masalah dapat dispesifikasikan menurut bidang-bidang yang ada dalam proses pendidikan.
- 4) Tahap pengenalan masalah (*problem sensing*). Pada tahap ini perumus kebijakan mengenalkan masalah yang sedang terjadi atau yang sedang dihadapi.¹³

b. Menentukan Peramalan Kebijakan Masa Depan

Langkah selanjutnya adalah perumus kebijakan menyediakan informasi-informasi terkait konsekuensi atau dampak yang akan terjadi pada masa mendatang dari penerapan alternatif yang ditentukan. Informasi tersebut didasarkan pada informasi yang telah ada atau yang telah terjadi.

Peramalan ini bertujuan untuk menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan pada masa depan. Perumus kebijakan berupaya untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan pada masa mendatang,

¹³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 226-246

sehingga dapat menentukan tindakan terbaik di antara berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh masa depan.

Peramalan ini juga memungkinkan adanya kontrol lebih besar dengan kebijakan masa lalu dengan konsekuensinya digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menentukan kebijakan pada masa mendatang. Dengan demikian memungkinkan perumus kebijakan membentuk masa depan secara aktif, terlepas dari apa yang terjadi pada masa lalu.¹⁴

Prediksi atau peramalan merupakan suatu tahapan untuk membuat informasi faktual tentang keadaan sosial pada masa depan berdasarkan informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.¹⁵

Terdapat tiga model peramalan, yaitu diantaranya:

- 1) Proyeksi, yaitu gambaran rancangan yang didasarkan pada pengamatan atas kecenderungan pada masa lalu dan masa depan.
- 2) Prediksi, adalah rancangan yang didasari oleh landasan teoretis. Hal terpenting dari prediksi adalah bahwa model ini memberikan spesifikasi berdasar penyebab dan akibat (konsekuensi) atau berdasar proses atau hubungan yang paralel (analog) yang diyakini mendasari suatu hubungan.
- 3) Perkiraan, merupakan ramalan berdasarkan pada penilaian yang bersifat informatif atau penilaian dari para ahli tentang keadaan pada masa yang akan datang. Model ini dapat berbentuk peramalan

¹⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis.*, 293.

¹⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis.*, 291.

yang diungkapkan berdasar pada intuisi yang dapat diasumsikan adanya kekuatan batin dan kreativitas atau pengetahuan terpendam dari para pelaku kebijakan. Dapat juga diungkapkan dengan argumen yang bersifat memotivasi sehingga tujuan, nilai serta keinginan masa kini atau masa mendatang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan kemungkinan pernyataan atau permalan.¹⁶

c. Menentukan Rekomendasi kebijakan

Pada tahap ini, perumus kebijakan dapat menentukan rekomendasi atau alternatif kebijakan yang terbaik dengan disertai alasan dalam pemilihan rekomendasi kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan berhubungan dengan masalah etika dan moral. Dalam hal tersebut, terdapat enam tipe kriteria dalam merekomendasikan kebijakan, yaitu: 1) efektivitas, berkenaan dengan ketercapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan yakni hasil(akibat) sesuai dengan harapan; 2) efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu dari kebijakan yang diterapkan; 3) kecukupan, yakni terkait dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai ataupun tuntutan yang menumbuhkan suatu masalah; 4) kesamaan, erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada penyaluran akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda

¹⁶ William N. Dunn, *Pengantar Analisis.*, 291-292.

dalam masyarakat atau yang memiliki kaitan dengan konsepsi yang saling bersaing; 5) responsivitas, kriteria yang berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu; 6) ketepatan, yakni berhubungan dengan rasionalitas substantif, dikarenakan pertanyaan tentang kelayakan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kekuatan asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.¹⁷

Adapun metode dalam merekomendasikan kebijakan yakni sebagai berikut, 1) pemetaan sasaran, adalah teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan, sasaran dan alternatif yang telah diidentifikasi dengan satu atau dua metode perumusan kebijakan; 2) klarifikasi nilai, merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan premis nilai berdasarkan seleksi terhadap sasaran kebijakan; 3) kritik nilai, adalah serangkaian prosedur untuk menguji mana yang lebih meyakinkan antara argumen-argumen yang saling berlawanan dalam suatu debat mengenai tujuan kebijakan; 4) perumusan elemen biaya, adalah suatu prosedur untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan semua biaya yang akan dikeluarkan ketika ditetapkan dan dilaksanakannya suatu program; 5) estimasi biaya, merupakan prosedur untuk menyediakan informasi

¹⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis*., 429-440.

tentang nilai uang masing-masing komponen dari struktur elemen biaya; 6) harga bayangan, merupakan suatu prosedur untuk membuat keputusan subjektif tentang nilai uang dari manfaat dan biaya ketika harga pasar tidak dapat dipercaya atau tidak tersedia.; 7) pemetaan hambatan, merupakan prosedur untuk mengidentifikasi keterbatasan atau hambatan yang dapat menghadang jalannya mencapai sasaran kebijakan dan sasaran program; 8) internalisasi biaya, merupakan prosedur untuk memasukkan semua biaya luar yang relevan (eksternalitas) ke dalam struktur elemen biaya internal; 9) diskonting, merupakan prosedur untuk memperkirakan nilai saat ini dari biaya dan manfaat yang akan diperoleh pada masa depan. Diskonting merupakan cara untuk menghitung dampak waktu ketika membuat rekomendasi suatu kebijakan; 10) analisis sensitivitas, merupakan prosedur untuk mengetahui sensitivitas hasil dari analisis biaya-manfaat atau biaya-efektivitas terhadap beberapa asumsi alternatif tentang kemungkinan tingkat biaya atau manfaat tertentu yang akan benar-benar terjadi; 11) analisis plausibilitas, adalah prosedur untuk menguji rekomendasi yang menentang pernyataan yang berlawanan.¹⁸

d. Mendeskripsikan dan Memantau Penerapan Kebijakan

Menurut Van Meter yang dikutip oleh Arif Rohman, implementasi kebijakan merupakan keseluruhan tindakan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang atau pihak pimpinan yang digiring

¹⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis.*, 464-493.

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁹ Implementasi kebijakan adalah penerapan keseluruhan tindakan yang diajukan oleh pihak yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan tersebut.

M. Grindle menyatakan bahwa proses implementasi mencakup beberapa tugas yang memiliki keterkaitan yang dapat memungkinkan arah suatu kebijakan dapat terealisasi sebagai hasil dari tindakan pemerintah.²⁰ Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan tugas-tugas yang saling berhubungan dan berkaitan dengan mendorong dalam pencapaian tujuan.

Solichin Mujianto berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses panjang menuju penyelesaian masalah, serta bagaimana pelaku kebijakan melaksanakan ketetapan baru yang telah diterapkan tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut, Riant Nugroho menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan agar suatu kebijakan organisasi dapat terlaksana serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara menerapkan secara langsung bentuk program kegiatan atau melalui aturan pelaksanaan kegiatan yang dapat memudahkan program kegiatan tersebut terlaksana atau dapat diterapkan.²¹ Dengan demikian, implementasi merupakan penerapan kebijakan baru yang telah ditetapkan dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah yang sedang

¹⁹ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 132.

²⁰ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 132.

²¹ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 78.

terjadi sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tahap mendeskripsikan penerapan kebijakan pendidikan ini merupakan proses analisis kebijakan, yang memungkinkan dapat menghasilkan informasi terkait berbagai rangkaian tindakan dalam pemecahan masalah yang memiliki dampak bagi keseluruhan masyarakat.

Pada tahap ini, perumus kebijakan memberikan informasi terkait sebab serta akibat dari suatu kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan pemantauan yang pernah dilakukan.

Adapun pendekatan yang dapat dilakukan oleh perumus kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntansi sistem sosial, merupakan suatu pendekatan atau metode yang memungkinkan perumus kebijakan memantau perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu.
- 2) Eksperimentasi sosial, adalah proses memanipulasi tindakan kebijakan secara sistematis sedemikian rupa sehingga memungkinkan diperolehnya jawaban yang cukup tepat terhadap persoalan sumber daya mana yang mengubah hasil kebijakan.
- 3) Pemeriksaan sosial, secara eksplisit merupakan kegiatan memantau hubungan antara input, proses, *output* dan dampak sebagai usaha untuk mengikuti masukan kebijakan dari titik input ini dikeluarkan ke titik input dirasakan oleh penerima terakhir yang dimaksudkan

dari sumberdaya tersebut. Pendekatan ini membantu menentukan apakah hasil kebijakan merupakan konsekuensi (dampak) dari kecukupan input kebijakan ataukah sebagai akibat dari proses yang mengalihkan sumberdaya atau pelayanan dari kelompok sasaran dan penerima manfaat yang diinginkan.

- 4) Sintetis riset dan praktik, merupakan pendekatan pemantauan yang menerapkan kompilasi, perbandingan dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari penerapan kebijakan publik pada masa lalu. Pendekatan ini memiliki dua sumber informasi dalam pelaksanaannya, yaitu studi asus tentang formulasi dan penerapan kebijakan, dan laporan-laporan penelitian yang mengupas terkait hubungan antara tindakan atau pelaksanaan dengan hasil kebijakan.²²

e. Mengevaluasi kinerja kebijakan

Suchman mengartikan evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang telah dicapai dari beberapa tindakan atau program yang telah direncanakan sebelumnya untuk menunjang pencapaian tujuan.²³ Evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menentukan hasil yang telah dicapai dari penerapan suatu kegiatan atau program yang telah ditentukan.

²² William N. Dunn, *Pengantar Analisis.*, 523-546.

²³ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 174.

Menurut Worthen dan Sanders, evaluasi merupakan pencarian sesuatu yang berharga²⁴, termasuk mencari informasi yang bermanfaat terkait penilaian terhadap penerapan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan dan diterapkan untuk menunjang pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengetahui realitas atau penerapan dari suatu kebijakan, terkait kesesuaian dengan kriteria yang ada serta dapat memberikan dampak real terhadap pemenuhan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat atau publik. Kegiatan evaluasi tersebut merupakan tahapan akhir dari penetapan kebijakan dengan tujuan dapat menghasilkan saran atau rekomendasi dalam menyempurnakan kebijakan pendidikan tersebut.

Evaluasi kinerja kebijakan dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat terkait kinerja kebijakan serta memberikan tambahan pembenaran dan kontak terhadap nilai-nilai dasar terkait pemilihan tujuan dan target.²⁵ Dalam evaluasi tersebut menekankan pada pedoman penerapan dari kebijakan yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran terkait perbedaan atau perkembangan yang dihasilkan dari penerapan kebijakan tersebut

Pelaksanaan evaluasi kebijakan dapat bertujuan untuk memonitor hal-hal yang dapat menjadi faktor kegagalan dari suatu

²⁴ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 174.

²⁵ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan.*, 72.

kebijakan, atau dapat bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pendidikan dan pencapaian yang diharapkan.²⁶

Adapun pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Semu (*pseudo evaluation*), adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya terkait hasil penerapan kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut kepada seorang individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Hal utama yang ada dalam evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak menimbulkan kontroversi.
- 2) Evaluasi Formal (*formal evaluation*), adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya terkait hasil penerapan kebijakan yang telah dipublikasikan secara formal oleh perumus kebijakan dan administrator atau pelaksana program. Hal utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target kebijakan diumumkan secara formal yang menjadi ukuran tepat dari pencapaian manfaat atau nilai penerapan kebijakan.

²⁶ Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis.*, 104

3) Evaluasi Keputusan Teoretis, merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif dalam menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kevalidan terkait hasil penerapan kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Hal utama dalam evaluasi keputusan teoretis adalah pendekatan ini berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan, baik tersembunyi maupun dipublikasikan. Berarti bahwa tujuan dan target dari para perumus kebijakan dan administrator kebijakan merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan menerapkan kebijakan dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target yang kinerjanya akan diukur. Salah satu tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menghubungkan informasi terkait hasil penerapan kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan.²⁷

B. Pendidikan Plus

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan pada umumnya telah dilalui oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan pendidikan telah ada sejak manusia ada di bumi.²⁸

Pendidikan selalu mengiringi proses kehidupan manusia. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan pada

²⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis.*, 613-623.

²⁸ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan bercorak Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 2.

hakikatnya pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri.

Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan dengan *to educate* yang memiliki arti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Pendidikan diartikan secara bahasa, memiliki arti memberikan bimbingan atau arahan para peserta didik dengan bentuk mengajar, memperbaiki dan melatih moral peserta didik.²⁹ Dengan demikian pendidikan merupakan proses pendewasaan seseorang dengan disampaikan atau diberikan berbagai wawasan keilmuan, serta terdapat pelatihan dan perbaikan moral pada seorang individu. Pendewasaan pada seseorang ditandai dengan adanya perubahan pada sikap, moral dan perilaku. Perubahan dalam hal ini pasti mengandung perubahan-perubahan moral, sikap dan perilaku menuju yang lebih baik

Dalam Undang-undang No, 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³⁰

Menurut Djumarsih, pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan serta mengembangkan potensi-potensi bawaan peserta didik, baik dari segi jasmani maupun rohani peserta didik yang sesuai dengan

²⁹ Aas Siti Sholichah, "Teori-Teori Pendidikan dalam Al-Quran: Edukasi Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 07. No. 1 (2018). 25

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab 1, Pasal 1.

nilai-nilai yang ada di masyarakat.³¹ Sedangkan menurut Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan sebagai pengembangan seorang individu pada semua aspeknya.³² Dengan catatan maksud dari “pengembangan diri” tersebut sudah mencakup pendidikan pada diri sendiri, lingkungan dan orang lain, sedangkan kata “semua aspek” sudah termasuk pendidikan dalam segi jasmani dan rohani

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan upaya bimbingan kepada peserta didik dengan memberikan berbagai informasi agar dapat mengembangkan serta menumbuhkan segala aspek potensi-potensi dalam diri mereka, baik pada segi jasmani maupun rohani mereka.

2. Ruang Lingkup Pendidikan

Pendidikan di Indonesia menganut konsep pendidikan seumur hidup yang mengacu dari suatu pandangan bahwa pendidikan merupakan unsur yang penting dalam sepanjang umur seseorang. Adapun ruang lingkup pendidikan di Indonesia meliputi: pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal.³³

a. Pendidikan informal

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh dari keluarga dan lingkungan sekitar.³⁴ Pendidikan yang tidak memerlukan

³¹ M. Djumransjah, *Filasafat Pendidikan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 22.

³² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2005), 28.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan* (Jakarta: Depdikbud, 2003) h .4

³⁴ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain sistem Pembelajaran* (Jakarta: Permada Mediagrup, 2009), 123-124

organisasi dan sebagainya dalam memperolehnya, yakni tanpa penunjukan orang tertentu sebagai tenaga pendidik serta dilakukan tanpa adanya program, evaluasi berupa ujian ataupun hal-hal yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi pendidikan ini sangat diperlukan bagi seorang individu dalam pembentukan pribadinya.

b. Pendidikan formal

Dalam pendidikan formal terdapat jenjang pendidikan yang berkelanjutan, yang telah ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik serta tingkat kesulitan pada bahan pelajaran. Adapun jenjang pada pendidikan formal sebagai berikut:

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan menengah.³⁵ Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan selama enam tahun (SD) dan tiga tahun menengah lanjut tingkat pertama (SMP) atau sederajat yang ditujukan sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya atau pendidikan menengah (SMA).

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar, yang terdiri dari pendidikan menengah dan menengah kejuruan (SMK/SMA Sederajat).³⁶ Pada umumnya pada

³⁵ Dalyono. M, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 56.

³⁶ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain sistem.*, 12.

jenjang pendidikan ini lebih mengutamakan perluasan wawasan ilmu dan peningkatan keterampilan siswa.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidika tinggi adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah pendidikan menengah, termasuk program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan kedokteran yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan diselenggarakan sistem terbuka.³⁷ Pada jenjang ini peserta didik dipersiapkan untuk menjadi salah satu anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan keprofesionalan yang dapat menerapkan, mengembangkan serta menciptakan suatu inovasi dalam bidang keilmuan.

Adapun pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat terlaksana secara terstruktur dan memiliki beberapa jenjang.³⁸ Jalur pendidikan ini dapat meliputi berbagai usaha, khususnya diselenggarakan secara terorganisir agar terutama generasi muda serta orang dewasa yang tidak sepenuhnya memiliki kesempatan mengikuti pendidikan sekolah formal dapat memilih pengetahuan praktis dan keterampilan dasar yang dibutuhkan sebagai warga Negara yang produktif.

3. Pengertian Pendidikan Plus

Kata plus dalam KBBI memiliki arti “lebih”; “berlebih”; “tambah” dan “tanda tambah”.³⁹ Kata plus berarti memiliki nilai lebih atau berlebih.

³⁷ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain sistem.*, 12

³⁸ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain sistem.*, 4.

³⁹ KBBI Daring. “Pengertian Plus”. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>), Diakses pada 11 Juli 2021).

Peneliti mengartikan kata plus sebagai kata sifat yang memberikan arti lebih atau memiliki kelebihan. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan plus adalah kelebihan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan formal atau sekolah.

Pendidikan plus merupakan suatu keunggulan dalam segi pembelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Adapun kelebihan ataupun keunggulan dalam kegiatan belajar mengajar dapat berupa, kelebihan dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang disuguhkan, program kegiatan-kegiatan tambahan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan sebagainya.

Dalam hal ini hampir sama dengan sekolah nasional plus yang memiliki keunggulan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Akan tetapi yang membedakan adalah sekolah Nasional Plus (Sekolah Nasional Berstandar Internasional/SBI) memiliki basis dua aliran kurikulum nasional. Adapun dua aliran kurikulum sekolah nasional plus tersebut adalah:

- a. Aliran yang mengadopsi sistem pendidikan internasional atau kurikulum internasional pada beberapa mata pelajaran.
- b. Aliran yang mengikuti sistem pendidikan nasional untuk semua tingkat pendidikan.

Adapun ciri khas dari sekolah nasional plus adalah beberapa mata pelajaran diajarkan dengan berbahasa Inggris, menyediakan guru *native speaker* dalam penerapan kurikulumnya, menyelenggarakan ujian

berstandar internasional, menambah program ekstrakurikuler serta penerapan kurikulum nasional dan internasional.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa sekolah nasional plus merupakan sekolah yang berbasis kurikulum nasional yang memiliki dua aliran yaitu aliran berbasis kurikulum internasional pada beberapa mata pelajaran dan aliran berdasarkan kurikulum pendidikan nasional di semua tingkat pendidikan dengan metode penyampaiannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi sekolah nasional plus ini berfokus pada keunggulan dalam keseluruhan sistem atau model pembelajaran, baik pada keunggulan metode pembelajaran hingga fasilitas yang disuguhkan, yang didasarkan pada kurikulum internasional dan kurikulum pendidikan nasional. Berbeda dengan pendidikan plus, dalam konteks penelitian ini pendidikan plus berfokus pada keunggulan di muatan lokal atau disiplin keilmuan yang disuguhkan.

⁴⁰ Parenting Indonesia. "Kelebihan Sekolah Nasional Plus". (<https://www.parenting.co.id/>, Diakses pada 11 Juli 2021).